



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 8 MARET 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Tak Ada Penyelesaian, TGR Diproses Hukum**

**Minggu Depan  
Mulai Panggil OPD**

**CURUP** - Kejaksaan Negeri (kejadi) Rejang Lebong (RL) sudah menggelar rapat dengan Bagian Administrasi Hukum Setkab RL dan Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten RL. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2017 yang belum terselesainya Rp 3,6 miliar. Seperti yang disampaikan Kajari RL Edi Utama, SH, MH melalui Kasi Datun Lucky

S. Marigo kepada RB. "Kita sudah menggelar rapat lagi bersama Bagian Hukum dan Inspektorat. Insya Allah minggu depan mulai memanggil atau mengundang OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) dan rekanan mereka yang masih memiliki TGR secara bertahap," terang Lucky.

Undangan pemanggilan, kata Lucky, untuk melakukan klarifikasi sekaligus mediasi dengan OPD maupun rekanan. Ini untuk memastikan apakah TGR yang disebutkan memang nilainya seperti yang dilaporkan apakah tidak sama versi OPD. "Kalau memang pernah disetorkan TGR nya, ya harus ada bukti setor ke kas daerah," kata Lucky.

Selain itu, sambung Lucky, undangan klarifikasi tersebut dalam rangka untuk melakukan rekun ulang jumlah TGR yang disampaikan kepada mereka dan hasilnya nanti dibuatkan surat pernyataan. "Kita sudah sepakat bersama Pemkab, kalau tidak ada penyelesaian maka JPN (Jaksa Pengacara Negara, red)

yang sudah diberikan SKK (surat kuasa khusus, red) yang ditunjuk akan gugat secara perdata. Atau diserahkan ke Seksi Pidana Khusus (red) untuk dilakukan proses hukum," imbuh Lucky.

Sebelumnya diketahui, Total keseluruhan TGR tahun 2017 mencapai Rp 5,7 miliar. Namun sudah terselesaikan Rp 2,076 miliar dan sisanya yang belum selesai mencapai Rp 3,6 miliar. TGR tersebut merupakan temuan hasil audit BPK dan terbagi dalam beberapa item yang mayoritas merupakan TGR dari pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran (TA) 2017 lalu.

Adapun temuan tersebut diantaranya realisasi perjalanan dinas yang terindikasi tidak sesuai nyatanya. Lalu kelebihan belanja modal dan denda keterlambatan yang belum dikembalikan. Ada juga temuan terkait kelebihan pembayaran gaji untuk PNS yang telah pensiun. Termasuk temuan kesalahan jumlah pembayaran pada penyedia barang/jasa. (\*\*)